

EDISI : Selasa, 01 Oktober 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN:
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

RESUME BERITA**EDISI :Selasa, 01 Oktober 2019**

NO	NAMA MEDIA	JUDUL BERITA	RESUME	KET.
1	FAJAR BALI	Sutjidra Lantik Dua Pejabat Fungsional RSUD Singaraja	Rumah sakit umum daerah buleleng kembali memiliki pejabat fungsional Dokter Ahli Utama yang baru, setelah Wakil Bupati Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra,Sp.OG remi melantik dua dokter ahli utama rumah sakit umum daerah buleleng. Dua dokter tersebut yakni dr. Nyoman suciawan,Sp.A dan dr. I Ketut Suardana,Sp.OG sebagai dokter ahli utama RSUD Buleleng. Sebelumnya kedua pejabat tersebut menjabat sebagai pejabat fungsional Ahli Madya. Pelantikan ini diselenggarakan di Aula RSUD Buleleng Kabupaten Buleleng, Senin (30/9) kemarin. Pelantikan tersebut disaksikan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng Putu Karuna,SH, Inspektorat Buleleng I Putu Yasa,SH.,MM.	
		Buleleng Tunjukan Sportivitas dengan Atlet Binaan Sendiri	Kabupaten Buleleng telah berhasil meraih kembali juara umum tiga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali XIV tahun 2019 di kabupaten Tabanan yang mana pada Porprov dua tahun sebelumnya sempat di rebut Kabupaten Gianyar. Terlebih lagi Buleleng tetap konsisten tunjukan sportivitas dengan menggunakan atlet binaan sendiri. Hal tersebut ditegaskan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana,ST saat ditemui usai menghadiri syukuran FORKI Buleleng terkait juara umum yang diraih cabang olahraga (coba) karate pada Porprov XIV tahun 2019 beberapa hari kemarin.	

		BEM Undiksha Datangi Para Wakil Rakyat	Dalam penyampaian kajian tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna beserta seluruh unsure pimpinan yang lainnya. Bukan hanya itu, kedatangan para mahasiswa Undiversitas Negeri Buleleng itu juga dihadiri asisten bidang Administrasi Umum Setda Buleleng Gede Suyasa di lantai dua DPRD Kabupaten Buleleng.	
2	NUSA BALI	Ditemukan lontar Langka Beraksara Buda Satu-satunya di Bali	Sebuah cakep lontar langka milik dadia Arya Ularan di Banjar Ketug ketug, Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng sudah didigitalisasi oleh Penyuluhan Bahasa Bali, Minggu (29/9). Uniknya, cakep lontar yang terdiri dari 71 lembar itu bertuliskan aksara Buda. Ini kasus langka dan menjadi satu satunya lontar beraksara Buda yang ditemukan di Bali. Cakep lontar beraksara Buda miliki karma Dadia Arya Ularan di desa Jinengdalem ini sudah berumur sekitar 300 tahun.	



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Bali Post*

Kategori : *Revisi UU*

Soal Revisi UU KPK

Mahasiswa Diminta Ajukan "Judicial Review" ke MK

Gelombang protes setelah disahkannya revisi Undang-undang (UU KPK) kembali mengemuka di Buleleng Senin (30/9) kemarin. Kali ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa (BEM-Rema) Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja melakukan aksi mengoreksi UU KPK. Sekitar 13 orang mahasiswa yang duduk di kepengurusan BEM itu menyampaikan hasil kajiannya kepada DPRD Buleleng. Lalu, apakah harapan DPRD Buleleng terkait koreksi dari BEM Rama Undiksha itu?

SELAIN menyebarkan hasil kajiannya, BEM Rama Undiksha juga akan menempuh jalur konstitusi atas revisi UU KPK tersebut. Atas produk kajian itu, DPRD Buleleng meminta BEM Rema mengajukan *judicial review* ke MK. Presiden BEM Rama I Made Ginastra mengatakan, berdasarkan kajian yang telah dilakukan terhadap revisi UU KPK, pihaknya menyatakan sikap mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menimbang *judicial review* terhadap hasil penge-

lahan revisi UU KPK. Ini dilakukan karena hasil kajian revisi UU KPK itu cacat formil. Ada beberapa pasal yang perlu dikaji ulang. Seperti pasal 1 ayat (3), pasal 12 B, pasal 24, pasal 37 A, pasal 37 B, pasal 37 E, pasal 40, dan pasal 47. "Hasil kajian kami ini ditandatangani civitas akademika dan disebar ke semua fakultas dan jurusan di Undiksha. Kami akan ajukan ke pemerintah pusat sebagai petisi protes kami atas revisi UU KPK tersebut," katanya. Selain menempuh jalur

konstitusi kata Ginastra, pihaknya juga mendesak pemerintah dan DPR mengkaji kembali revisi UU KPK yang sudah disahkan tersebut. Ini karena ada kesan melemahkan KPK dalam melaksanakan tugasnya melakukan pemberantasan korupsi. Apalagi, ketika produk hukum ini dibahas tidak melibatkan publik dan akademisi. Bahkan, revisi UU KPK itu tidak melalui keputusan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR. "Kami bersama civitas akademika dan masyarakat umum terus melakukan penolakan terhadap setiap upaya yang melemahkan pemberantasan korupsi," katanya.

Dalam audiensi ini, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengatakan, pihaknya tidak dapat memberikan penjelasan lebih dalam terkait UU KPK. Sebab yang menyusun UU itu adalah anggota di DPR-RI. Namun, Supriatna mengaku apa yang menjadi

tuntutan BEM Undiksha itu akan disampaikan ke pusat. Politisi asal Desa Tejakula itu meminta BEM Rema Undiksha melakukan *judicial review* langsung ke MK.

"Mahasiswa kami 'tantang' tarung melakukan *judicial review* ke MK. Dengan begitu bisa membuat nama baik Undiksha di tingkat nasional, daripada melakukan aksi demo di jalan," katanya.

Selain kepada DPRD, mahasiswa juga menyerahkan hasil kajiannya itu kepada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana. Saat penyerahan, Bupati diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Buleleng Gede Suyasa. Dia mengapresiasi upaya mahasiswa yang mengajukan jalur konstitusi menyuarakan aspirasi atas revisi UU KPK. "Kami sangat menghargai dan memberikan apresiasi apa yang dilakukan BEM Rama Undiksha," ujar Gede Suyasa. (mud)



HASIL KAJIAN - BEM Rema Undiksha menyerahkan hasil kajian atas revisi UU KPK, Senin (30/9) kemarin. Bali Post/kmb38

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

~ BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG ~



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Bali Post*

Kategori : *lakalantas*

Truk DLH Tabrak Toko Sepatu Lima Petugas Angkut Sampah Terluka

Singaraja (Bali Post) -

Nasib nahas dialami lima orang pekerja pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng. Kelima orang itu terluka setelah truk yang dinaiki mengalami kecelakaan lalu lintas (lakalantas) Senin (30/9) kemarin. Truk milik DLH DK 9320 U menabrak toko sepatu di persimpangan Jalan Ngurah Rai - Jalan Letkol Wisnu - Jalan Pramuka - Jalan Melati atau persis di depan KFC Singaraja.

Informasi yang dikumpulkan di lapangan menyebutkan, sebelum kejadian itu, truk yang dikemudikan Kadek Ariawan (38), warga asal Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng itu berangkat dari kantor DLH di Kelurahan Banyuning untuk mengangkut sampah di Desa Baktiseraga. Saat truk melintas dari arah timur atau Jalan Letkol Wisnu kemudian truk itu berbelok di persimpangan. Namun, tiba-tiba truk nahas itu kehilangan kendali. Tragisnya, truk yang melaju liar itu menabrak bangunan yang digunakan untuk toko sepatu di pinggir jalan. Selain menabrak bangunan toko, truk itu sebelumnya menabrak sepeda motor yang diparkir di depan toko. Akibat kerasnya benturan itu sepeda motor yang ditabrak itu terhempas beberapa meter bahkan ma-

suk ke dalam toko.

Akibat kejadian ini, pengemudi Ariawan bersama empat rekannya terluka karena benturan. Kelimanya kemudian dievakuasi ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Buleleng.

Salah seorang saksi yang juga sebagai karyawan toko Eliyani (20) mengatakan, sebelum kejadian itu, dirinya sedang merapikan koleksi sepatu di dalam toko. Sementara, sepeda motor miliknya DK 6020 UR diparkir di halaman toko. Pukul 12.51 Wita, tiba-tiba saksi mendengar suara benturan keras. Setelah suara benturan itu, dirinya kembali dikejutkan suara keras dari toko itu setelah sepeda motor miliknya itu terhempas beberapa meter ke toko itu. Saksi yang terkejut kemudian keluar toko dan kemudian ditemukan truk pelat

merah itu telah menabrak toko di tempatnya bekerja.

Tidak berselang lama, warga yang melihat kejadian itu berusaha membantu pengemudi dan empat penumpang truk itu keluar dari dalam truk. "Saat saya lari keluar toko, saya lihat truk itu sudah menabrak toko. Kondisi sopir dan penumpangnya tidak persis saya lihat karena situasi ramai. Polisi juga ikut menolong. Kemungkinan korban terjepit saat tabrakan itu terjadi," katanya.

Truk Dievakuasi

Kepala Subbagian (Kasubag) Humas Iptu Gede Sumarjaya seizin Kapolres Buleleng AKBP Suratno, S.IK. membenarkan kejadian lakalantas tersebut. Menurutnya, setelah menerima laporan kejadian, personel Satlantas Polres

Buleleng itu masih melakukan penyelidikan dengan mendengarkan keterangan saksi yang diduga melihat kejadian tersebut. Sementara, truk sudah dievakuasi dari lokasi kejadian dan kerusakan yang ditimbulkan telah disepakati akan diperbaiki pihak DLH Buleleng. Selain itu, DLH juga sudah berkoordinasi dengan pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memperbaiki pipa air minum yang rusak karena benturan saat kejadian itu.

"Apa penyebabnya, masih kami dalam. Mengamati pengemudi itu belum bisa dimintai keterangan. Sebab, masih menjalani perawatan di rumah sakit," jelasnya.

Di tempat terpisah, Kepala DLH Buleleng, Putu Ariyadi Pribadi, telah mendapatkan laporan kejadian lakalantas yang dialami stafnya itu. Begitu mendengar kejadian itu, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan pihak pemilik toko terkait perbaikan toko bangunan yang ditabrak itu. Dari koordinasi

itu, DLH akan memperbaiki kerusakan bangunan toko itu. "Kami sudah mengkoordinasikan. Kerusakan toko itu kita akan perbaiki. Kasus itu sudah diselesaikan secara keseluruhan," katanya.

Di sisi lain, mantan Camat Gerokgak ini mengatakan, truk yang dikemudikan anak buahnya itu sejatinya masih laik jalan. Namun karena *out of control*, truk itu menabrak toko hingga pengemudi bersama empat petugas pengangkut sampah itu terluka.

Sebelum kejadian, tiga pekerja duduk di depan bersama pengemudi. Sedangkan, satu petugas lain berada di belakang. Karena hilang kendali dan menabrak toko, sehingga kelimanya terluka.

"Kami punya 24 unit truk termasuk truk ini kondisinya laik jalan. Rem berfungsi dengan baik, karena sebelumnya kami rutin servis termasuk KIR-nya masih berlaku. Informasi awal ini *out of control* dan segala kerusakan yang diakibatkan ditabrak truk itu, kami segera perbaiki," jelasnya. (kmb38)

Sub Bagian Dol si

~ BAGIAN HUMAS DAN PROTO. COL ~ TEN BULELENG ~



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Bali Post*

Kategori : *Pelantikan*

Dua Dokter Ahli Utama Dilantik

Singaraja (Bali Post) -

Dua dokter spesialis dilantik sebagai dokter ahli utama Senin (30/9) kemarin. Kedua dokter tersebut menjabat sebagai pejabat fungsional ahli utama. Pelantikan pejabat fungsional ahli utama itu berdasarkan Keputusan Presiden No. 51/M Tahun 2019, tanggal 4 September 2019, tentang Pengangkatan dengan jabatan fungsional ahli utama.

Setelah dilantik, kedua pejabat tersebut akan memiliki masa bakti hingga batas umur 65 tahun. Hingga saat ini, RSUD Buleleng telah memiliki 40 dokter spesialis. Dengan status Rumah Sakit Pendidikan, RSUD sangat memerlukan dokter spesialis. Sehingga dengan jabatan ahli utama itu akan dapat memperpanjang masa jabatan dokter spesialis di RSUD.

Wakil Bupati Buleleng dr. I Nyoman Sutjitra, Sp. OG, mengatakan, para dokter ahli utama itu akan dapat menjalankan tugas-tugasnya melayani masyarakat. Selain itu, pihaknya menginginkan pejabat yang baru dilantik itu bisa menjadi contoh bagi rekan-rekannya yang lain. Se-

hingga teman-temannya punya motivasi yang sama yakni meningkatkan kualitas diri untuk kelangsungan proses layanan kesehatan yang semakin baik. "Banyaknya dokter spesialis yang menjabat sebagai dokter ahli utama akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD," katanya.

Direktur Utama (Dirut) RSUD Buleleng dr. Gede Wiartana, M.Kes. mengatakan, pelantikan ini sesuai PP No. 11 Tahun 2017, tentang manajemen PNS, sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menjalankan amanat itu sebagai bentuk partisipasi dalam pengembangan sumber daya manusia bagi jabatan fungsional tertentu. "Dokter spesialis itu memang tenaganya sangat diperlukan. Sebelumnya, batas usia pensiunnya 60 tahun. Namun kini, diperpanjang menjadi 65 tahun. Ini memberikan imbas pada peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di rumah sakit," katanya. Pelantikan juga dihadiri Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Buleleng Putu Karuna dan juga Inspektori I Putu Yasa. (kmb38)



DILANTIK - Dua dokter ahli utama dilantik, Senin (30/9) kemarin.

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

~ BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG ~



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Bali Post*

Kategori : *Penolakan*

Tolak Revisi UU KPK BEM Unipas Gelar Aksi Damai

Singaraja (Bali Post) -

Puluhan mahasiswa Universitas Panji Sakti (Unipas) Singaraja melakukan aksi damai menolak Revisi UU KPK. Aksi damai penolakan itu ditunjukkan dengan menggelar orasi di halaman kampus Senin (30/9) kemarin. Orasi itu pada intinya menyikapi mencuatnya isu-isu yang sekarang sedang aktual dan sedikit gaduh di masyarakat.

Mahasiswa ini menyampaikan enam poin pernyataan sikap. Pernyataan sikap itu dibacakan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unipas, Wayan Ryantika. Pernyataan sikap itu yakni BEM Unipas menyatakan dirinya tidak terlibat aksi demonstrasi yang mengatasnamakan BEM Seluruh Indonesia. Kedua, BEM Unipas mendukung penundaan pengesahan Rencana Undang-undang KUHP dan Rencana UU lainnya, sampai dilakukan kajian lebih mendalam dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Ketiga, BEM Unipas akan menginisiasi diskusi konstruktif dengan BEM dari perguruan tinggi lain di Bali Utara. Keempat, BEM Unipas mengutuk keras aksi demo yang berujung anarkis dan adanya perusakan fasilitas umum. Kelima, BEM Unipas mengajak agar tercipta suasana kondusif seperti menjaga fasum dari kerusakan. Keenam, mengimbau aparat kepolisian

menindak tegas pelanggaran yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dekan Fakultas Hukum Unipas Nyoman Gede Remaja mengatakan, mahasiswa perlu mengambil sikap terhadap revisi UU KPK yang telah disahkan belum lama ini. Alasannya, UU KPK satu-satunya harapan yang bisa menjaga negara dari aksi tidak konstruktif koruptor yang merongrong keuangan negara. Remaja menambahkan pihaknya tidak mempermasalahkan perubahan terhadap UU KPK. Hanya, perubahan itu harus dipastikan bisa menjaga lembaga KPK itu sendiri. Selain itu, perubahan terhadap UU itu harus bisa menjamin KPK bisa berfungsi lebih efektif dan lebih baik. "Kalau ada kesan melemahkan KPK, hal itu harus lawan. Kita tunggu keputusan *judicial review* di MK," katanya.

Terkait Rancangan UU KUHP, Gede Remaja mengatakan, rancangan itu sudah dibahas sejak lama. Kalau memunculkan kontroversi, pihaknya menilai hal itu masih ada masalah dalam pokok materi RUU KUHP yang disusun itu. "Kami di FH berkomitmen mengkaji RUU KUHP melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pengkajian secara komprehensif itu kami kawal, dengan cara memberikan masukan dan saran-saran," jelasnya. (kmb38)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

~ BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG ~